

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Negara Indonesia sejak dahulu tidak sedikit memberikan pengaruh terhadap hukum yang berlaku di Negara ini. Sebagai Negara hukum, Indonesia tidaklah menganggap hukum sekedar sebagai suatu peraturan belaka, tetapi menjunjung, bahkan segala sesuatu dihubungkan pada sesuai tidaknya dengan hukum.

Sejak dirancangnya pembangunan hukum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pembangunan di Indonesia menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak hanya sebagai sarana pengendalian sosial, untuk memperlancar interaksi sosial, untuk mendatangkan keseimbangan, perdamaian dan pengayoman dalam masyarakat tapi juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dan perubahan masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang hanya mengikuti masyarakat melainkan hukum juga harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahap-tahap nasional yang dilancarkan.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR. RI.No.IV/MPR/1999 Bab IV arah kebijakan angka 1 dan 2 ditegaskan bahwa :

1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum, tegakkan Negara hukum.
2. Menghormati dan menghargai hukum agama dan hukum adat serta mempengaruhi perundang-undangan kolonial dan hukum nasional yang diskriminasi, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat, dan agama, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi terhadap adanya keanekaragaman hukum. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sistem hukum yang bersifat majemuk yang didalamnya berlaku berbagai sistem hukum yang mempunyai corak dan susunannya sendiri yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Sama halnya dengan hukum kewarisan, di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yaitu :

- a) Sistem hukum kewarisan perdata barat yang tertuang dalam BW (KUH Perdata).
- b) Sistem hukum kewarisan adat yang berneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.
- c) Sistem hukum kewarisan Islam yang bersumber dari nash Al-Qur'an.¹

Bahwa dari seluruh hukum yang berlaku dewasa ini selain hukum perkawinan, hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Setiap manusia pasti akan mengalami sesuatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Menjadi dasar pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum perdata Barat bahwa setiap manusia itu merupakan orang pembawa hak, sebagai pembawa hak padanya dapat diberikan hak (menerima warisan, menerima

¹ Syaikh at-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Cet 2 ; Bandung Hasyimi, 2004), h. 330.

hibah mutlak dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban. Jadi, hukum yang mengatur bagaimana cara-cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²

Jadi, apabila seseorang pada suatu saat karena usianya yang sudah uzur atau karena mengalami suatu kejadian misalnya, terjadi kecelakaan, terserang penyakit yang sulit disembuhkan, dan lain sebagainya. Seseorang itu meninggal dunia dan sebelum kematian itu dirinya membuat sesuatu ketetapan kehendak terakhir, maka perbuatan itu adalah suatu perbuatan hukum. Kehendak pewaris diarahkan pada akibat hukum dan memanifestasikan diri melalui suatu pernyataan.³ Ketetapan kehendak terakhir pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang sepihak yang baru berlaku setelah kematian, serta dapat ditarik kembali. Kehendak ini dinamakan wasiat.⁴

Dalam bahasa Belanda surat wasiat disebut dengan testament yaitu “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak”.

² Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), h. 6

³ Pasal 33 Buku III KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

⁴ Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: PT Eresco, 1993), h. 21

Dasar hukum dari kedudukan waris testament adalah pasal 874 BW yang menyatakan bahwa “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut UU, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah “.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan wasiat diatur dalam pasal 194 yang menyatakan bahwa :

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

B. Rumusan Masalah

Menyikapi latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yakni;

1. Bagaimanakah pelaksanaan wasiat pada masyarakat kota Makassar?;
2. Bagaimanakah pemahaman wasiat dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia di kota Makassar?.
3. Bagaimanakah pemahaman wasiat dalam pandangan Kaum Muhammadiyah di kota Makassar?.

C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup

Untuk memudahkan pemahaman isi skripsi, maka penulis akan menguraikan dan menjelaskan beberapa variabel yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi yang berjudul “Pemahaman Wasiat Dalam Prespektif MUI dan Muhammadiyah di Kota Makassar” Maka sebagai upaya untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam interpretasinya maka di dalamnya penulis memberikan batasan pengertian dari kata-kata yang dimaksud.

1. Istilah “*Pemahaman*” Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.⁵ Bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.⁶ Dengan pemahaman, kita diminta untuk membuktikan bahwa kita memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep.

⁵ Amran YS Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Cet. V; Bandung: Pustaka Setia, 2002).h. 427 – 428

⁶ Suharsimi Arikunto. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. (Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara,2009) h. 118 – 137

2. Istilah “*Wasiat*” diambil dari bahasa Arab Al-Washiyah yang artinya pesan, perintah atau nasehat. Ulama fiqh mendefenisikan wasiat dengan menyerahkan harta dengan suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang itu wafat, baik harta itu berbentuk materi ataupun berbentuk manfaat.⁷
3. Istilah “*Perspektif*” merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu hal, dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-cara tertentu, dan cara-cara tersebut berhubungan dengan asumsi dasar yang menjadi dasarnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang dipandangnya. Perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu.⁸

⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Pres, th. 1979), h. 2. 4

⁸ *Op.cit* h. 678 – 679

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini nantinya akan membahas tentang bagaimanakah pemahaman wasiat dalam perspektif MUI dan Muhammadiyah di kota Makassar.

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu “Pemahaman Wasiat Dalam Prespektif MUI dan Muhammadiyah di Kota Makassar”. Sudah banyak literatur yang membahas tentang wasiat, maka penulis telah menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dasar-dasar Hukum Waris Islam di Indonesia, karangan **Oemar Salim SH.** yang menjelaskan bahwa Wasiat bukan hanya dikenal dalam sistem hukum Islam tetapi juga di dalam sistem hukum barat, misalnya yang dinamakan testament yaitu suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.
2. Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, karangan **KH. Sofyan Hasan, SH.** menyatakan bahwa Ulama menafsirkan Q.S Al-Baqarah 180 berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu – bapak dan kerabat) yang asalnya wajib sampai sekarang pun kewajiban tersebut tetap dan dapat diperlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah

kepada walidain dan aqrabin yang mendapatkan bagian harta peninggalan tetap diterapkan dan dilaksanakan, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh baik oleh Al-Qur'an maupun Hadits. Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wasiat wajibah ada yang membolehkan dan sebagian melarangnya. Perbedaan ini karena perbedaan menafsirkan surah Al-Baqarah 180 terhadap ketentuan hukum wasiat.

Di samping kedua buku di atas, masih banyak buku penunjang lainnya yang juga erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang tercantum dalam pembahasan ini. Kedua buku di atas pada dasarnya telah membahas sedikit tentang sistem wasiat dalam Islam namun masih bersifat umum, sementara yang penulis akan bahas adalah mengenai Pemahaman Wasiat Dalam Prespektif MUI dan Muhammadiyah di Kota Makassar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Wasiat

1. Pengertian Wasiat Menurut Hukum Islam

Kata wasiat dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 9 kali, dan kata lain yang seakar disebut 25 kali. Secara bahasa kata “wasiat” artinya berpesan, menetapkan, memerintah (QS. Al-An’am, 6:151-153 dan QS. An-Nisa’, 4:131). Mewajibkan (QS. Al-Ankabut, 29:8, Luqman, 31:14, Al-Syura, 42:13, Al-Ahqaf, 46:15), dan mensyariatkan (An-Nisa’, 4:11).¹

Wasiat atau *Al-washiyyah* bermakna pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Wasiat salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.²

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang-barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah yang berwasiat mati.³

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdana Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008). h. 149

² *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*, Editor Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta : Ichtiar Islam Baru Van Hoeve, 1996). Lihat juga di Kitab Al-Fiqih ‘ala Mazhab Al-Arba’a karya Abddurrahman Al-Jaziry Juz II. H. 224

³ Asyhari Abta, Dujunaidi Syukur, *Ilmu Waris Dsekripsi Islam Praktis dan Terapan*, (Surabaya : Pustaka Hukumah Pedana, 2005)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya.⁴

Para imam mazhab empat memberikan beberapa pengertian terhadap arti wasiat, namun pada dasarnya memiliki maksud yang sama yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewasiat meninggal. Beberapa definisi wasiat yang diberikan oleh beberapa mazhab.

a. Mazhab Hanafi

تمليق

يق

Artinya : *“Wasiat adalah pemilikan yang disandarkan kepada sesuatu setelah pemberi wasiat meninggal dengan jalan sukarela”*.⁵

Mazhab Hanafi mengatakan “ tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya “.

b. Mazhab Maliki

عقد يوجب حقافي

يل بموته ويوجب نيابة عنه بعد

Artinya : *“Wasiat adalah suatu perikatan yang mewajibkan adanya hak sepertiga harta orang yang mengaqadkannya, yang perikatannya itu dilaksanakan dengan sebab meninggalnya pewasiat atau mewajibkan pengganti dari pemilikannya setelah pewasiat meninggal”*.⁶

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Cet. Ke-1 hal. 100

⁵ Abdurahman Al-Jaziry, Kitab Fiqhi ‘ala al-Mazhabi al arba’ah, (Beirut, Dar Al-Fikr, Maktabah At-Tijariyah, 1987), Juz III, hal 315

⁶ *ibid*

c. Mazhab Sayfi'i

لـ

Artinya : “Wasiat adalah suatu sukarela yang ditangguhkan pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal, baik diucapkan dengan kata-kata ataupun tidak”.⁷

d. Mazhab Hambali

Artinya : “ Wasiat adalah suatu perintah untuk mentasarrufkan (harta) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pewasiat meninggal “. ⁸

Dari semua uraian tentang pengertian wasiat yang dikemukakan diatas oleh para Imam Mazhab, bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah “suatu yang mewajibkan adanya hak sepertiga harta orang yang menjadikan meng-aqadkan secara sukarela, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pewasiat meninggal dunia baik diucapkan dengan dengan kata-kata ataupun tidak”.

Kompilasi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang digunakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dilingkungan peradilan agama di Indonesia memiliki definisi sendiri tentang wasiat yang merupakan kesimpulan dari definisi-definisi yang diberikan oleh para Imam Mazhab. Pengertian wasiat menurut kompilasi hukum Islam tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (f) yaitu memberikan suatu benda

⁷ Abdurahman Al-Jaziry, Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabi al arba'ah, Terjemahan(Beirut, Dar Al-Fikr, Maktabah At-Tijariyah, 1987), Juz III, hal 315

⁸ *ibid*

dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁹

Bila melihat dari semua uraian diatas mengenai pengertian wasiat baik dari para Imam Mazhab atau menurut kompilasi hukum Islam, maka dapat diambil suatu arti bahwa yang dimaksud wasiat mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Wasiat merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan atas dasar kerelaan hati, baik berupa barang, manfaat atau pesan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.
- b. Wasiat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia
- c. Jika wasiat tersebut berupa harta, maka tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan diambil biaya hutang kepada orang lain.

2. Pengertian Wasiat Menurut Hukum Perdata (BW)

Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada asanya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroep*), boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stillzwijgend*).¹⁰

Yang paling lazim suatu testament atau wasiat berisi apa yang dinamakan suatu “ *efstelling* “ yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari

⁹ H. Abdurahman, Kompilasi hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1992), Cet ke-1 hal 156

¹⁰ Lihat Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Burgerlijk Wetboek). (cet. 1, Jakarta :Sinar Grafika, 1993)

warisan. Orang yang ditunjuk tersebut disebut dengan *testamentaire erfgenaam*, yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia juga memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal. Suatu testament atau wasiat juga dapat berisikan suatu *legaat* yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa :

- a. satu atau beberapa benda tertentu.
- b. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak.
- c. Hak *vruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan.
- d. Suatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima suatu *legaat* dinamakan *legataris* yang bukan ahli waris. Karenanya ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, akan tetapi ia berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Isi suatu testament tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja, dalam suatu testament dapat juga dengan sah dilakukan penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal.

Hukum waris menurut BW mengenal pengaturan wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu: "Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang

tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.” Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi. Dalam KUH Perdata (BW) mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:

a. Wasiat Olografis

Yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu:

- 1) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
- 2) Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat

tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris

dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda. Surat wasiat yang disimpan pada seorang notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris.

Dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Sedangkan notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.

b. Wasiat Umum

Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan.

Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

- 1) para ahli waris atau orang yang menerima wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
- 2) anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris.
- 3) pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.

c. Wasiat Rahasia

Yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi.

Selanjutnya pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut. Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.

B. Dasar Hukum Wasiat

1. Dasar Hukum Wasiat Menurut Hukum Islam

Wasiat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebbaikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Karena bersedekah pada saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekah setelah ia meninggal juga termasuk kebaikan, disyariatkannya wasiat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalam Al-Quran Allah SWT Berfirman dalam Al-Baqarah ayat 108 :

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya sevcara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *maraadh al-mawt* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain

bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena itu orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya.

Dalam tafsir menyatakan bahwa makna *ma'ruf* ialah adil dan baik. Sehingga wasiat itu tidak melebihi dari sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal dunia.

Ayat diatas menunjukkan diwajibkan berwasiat untu kedua orang tua dan kerabat yang dekat. Tetapi *jumhur* Ulama, setelah turunya surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan tentang pembagian harta wairs, maka kewajiban memberi wasiat menjadi makruh. Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut diatas, para ahli Hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat itu. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat ini tidak *fardhu 'ain*, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan.

Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli Hukum Islam itu adalah kewajiban hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam Al-Quran suarah Al-Baqarah ayat 180 itu telah *nasakh* oleh surah An-Nisa ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik yang menerima warisan atau tidak menerima warisan setelah turunnya suarah An-Nisa ayat 11-12 itu sudah

tertutup haknya untuk menerima wasiat.¹¹ Sehingga pemberi wasiat hukumnya menjadi sunnah dan hanya boleh diberikan terhadap orang yang bukan ahli waris.¹²

2. Dasar Hukum Wasiat Menurut Hukum Perdata (BW)

Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.¹³ Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu “*erfselling*” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*.”¹⁴

Adapun dasar hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut¹⁵ :

¹¹ *Ibid.* h.153

¹² Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. *Op. Cit.* h.304

¹³ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 hal. 82.

¹⁴ *Ibid* hal.83

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004

- a. Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 874 KUH Perdata). Surat wasiat atau *testamen* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUH Perdata). Ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus (Pasal 876 KUH Perdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang (Pasal 877 KUH Perdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUH Perdata). Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau *substitusi fidelcommissaire* adalah dilarang (Pasal 879 KUH Perdata). Larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat *Fidelcommissaire* (Pasal 880 KUH Perdata). Apabila pewaris telah meninggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian harta warisan (Pasal 881 KUH Perdata). Seorang pihak ketiga mendapat hak warisan atau wasiat dalam hal ahli waris atau penerima wasiat tidak menikmatinya (Pasal 882 KUH Perdata). Hak pakai hasil diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada orang lain (Pasal 883 KUH Perdata). Harta peninggalan

atau wasiat seluruhnya atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan (Pasal 884 KUH Perdata). Surat wasiat tidak boleh ditafsirkan menyimpang (Pasal 885 KUH Perdata). Surat wasiat lebih baik diselidiki lebih dahulu apa maksud si pewaris (Pasal 886 KUH Perdata), dan juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai (Pasal 887 KUH Perdata). Surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (Pasal 888 KUH Perdata). Persyaratan tersebut dapat menghalangi pemberian harta waris (Pasal 899 KUH Perdata). Pewaris berhak untuk mengubah surat wasiat (Pasal 890 KUH Perdata). Alasan baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian wasiat batal (Pasal 891 KUH Perdata). Suatu beban ahli waris dapat dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima wasiat (Pasal 892 KUH Perdata). Suratsurat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal (Pasal 893 KUH Perdata). Bila suatu kecelakaan menyebabkan ahli waris meninggal dunia maka pewaris dapat membatalkan surat wasiatnya (Pasal 894 KUH Perdata).

- b. Bagian II Tentang Kecakapan Seorang Untuk Membuat Surat Wasiat atau untuk Menikmati Keuntungan dari Surat Yang Demikian Yang Intinya Mengatur: Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu surat wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar. (KUH Perdata. 433, 446, 448, 875, 898, 992 jo Pasal 896 KUH Perdata), setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu.

(KUH Perdata. 2, 118, 173, 433, 446, 448, 836, 897, 1676.), (Pasal 897 KUH Perdata), anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat. (KUH Perdata. 151, 169, 330, 904 dst., 1677 jo Pasal 898 KUH Perdata), kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat surat wasiat dibuat. (KUH Perdata. 895, 904 dst. Jo Pasal 899 KUH Perdata) untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan. (KUH Perdata. 472, 489 dst, 836, 881, 894, 973 dst., 976, 1001 dst. Jo Pasal 900 KUH Perdata (s.d.u. dg. S. 1937-572.), setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir-miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk menerimanya (KUH Perdata. 1046, 1680.), (Pasal 901 KUH Perdata), seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat istrinya atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di pengadilan karena persoalan tersebut (KUH Perdata. 28, 35 dst., 87, 91, 911 jo Pasal 902. (s.d.u. dg. S. 1935-486.), suami atau istri yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan yang dahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya,

tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami. (Pasal 902a KUH Perdata dan (s.d.t. dg. S. 1923-31.), pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan, (Pasal 903 KUH Perdata) suami atau istri hanya boleh mengwasiatkan barang-barang dari harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masingmasing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dari harta bersama itu diwasiatkan, si penerima wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada para ahli waris sebagai bagian mereka. (KUHP Perdata. 128 dst., 134 dst., 138, 966, 1032, 1067 jo Pasal 904 KUH Perdata). Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh mengwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah menjadi dewasa, dia tidak boleh mengwasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya. Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dari anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya. (KUHP Perdata. 330, 410, 412, 897, 905, 911, 1681 jo Pasal 905 KUH Perdata), Anak di bawah umur tidak boleh mengwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersama dia, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan

mengingat baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya. (KUH Perdata. 879, 904, 911 jo Pasal 906 KUH Perdata). Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama dia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan dia meninggal, (Pasal 907 KUH Perdata) not aris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu, (KUH Perdata 911, 938 dst., 944, 953, 1681; Not. 21 jo Pasal 908 KUH Perdata) Bila ayah atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah dan anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undangundang, maka mereka yang terakhir ini tidak akan boleh menikmati warisan lebih dari apa yang diberikan kepada mereka menurut Bab XII buku ini. (KUH Perdata 280 dst., 862 dst., 911, 916, 1681 jo Pasal 909 KUH Perdata) pelaku zinahan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinahnya, dan kawan berzinah ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat si pelaku, asal perzinahan itu, sebelum meninggalnya si pewaris, terbukti dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. (KUH Perdata 911, 1681; Rv. 83, 334, 402 jo S. 1872-11 jis. Stadblad. 1915-299, 642. (Bandingkan. KUH Perdata 937) (Pasal 911 KUH Perdata), suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu dibuat dengan nama seorang perantara. Yang dianggap sebagai orang-orang perantara ialah ayahnya

dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan anak-anaknya, suami atau istri. (KUH Perdata 183, 1681, 1921 jo F. 44 jo Pasal 912 KUH Perdata), orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu).

- c. Bagian 3 tentang *Legitime Portie* Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan Hibah-Hibah Yang Mengurangi *Legitime Portie* Itu bagian ini mengatur: (Pasal 913 KUH Perdata) *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari hartabenda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. (KUH Perdata 168, 176, 181, 307, 385, 842 dst., 875, 881, 902, 1019, 1686 dst. Jo Pasal 914 KUH Perdata) Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang. (Pasal 915 KUH Perdata). Dalam garis ke atas *legitime portie* itu selalu sebesar separuh dan apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian. (Pasal 916 KUH Perdata) anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah,

memperoleh seperdua bagian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. (Pasal 916a KUH Perdata) untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan pihak-pihak yang menjadi ahli waris. (Pasal 917 KUH Perdata) keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka harta peninggalan tersebut harus dihibahkan. (Pasal 918 KUH Perdata) penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil yang jumlahnya merugikan *legitieme portie*, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memiik untuk melaksanakan penetapan itu. (Pasal 919 KUH Perdata) Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaankeadaan di mana orang-orang tersebut terakhir ini sehubungan dengan Bab 17 buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali. (Pasal 920 KUH Perdata) Pemberian-pemberian kepada ahli waris yang masih hidup yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi. (Pasal 921 KUH Perdata), untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu pewaris meninggal dunia. (Pasal 922 KUH Perdata). Pemindah-tanganan suatu barang, dengan bunga dianggap sebagai hibah. (Pasal 923 KUH Perdata), bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan ahli waris sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan

dimaksudkan dalam *legitieme portie*. (Pasal 924 KUH Perdata) Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitieme portie*. (Pasal 925 KUH Perdata) Pengembalian barang-barang dalam wujud tetap. (Pasal 926 KUH Perdata). Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan tiap-tiap ahli waris. (Pasal 927 KUH Perdata), penerima hibah yang memanfaatkan barang-barang hibah wajib mengembalikan hasil dari pemanfaatan hibah tersebut. (Pasal 928 KUH Perdata) Barang-barang tetap harus dikembalikan ke dalam harta peninggalan. (Pasal 929 KUH Perdata) Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit.

- d. Bagian 4 Bentuk Surat Wasiat Mengatur: (Pasal 930 KUH Perdata) Tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama. (Pasal 931 KUH Perdata), surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. (Pasal 932 KUH Perdata), wasiat *olografis* harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. (Pasal 933 KUH Perdata), wasiat *olografis* setelah disimpan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. (Pasal 934 KUH Perdata), pewaris boleh meminta kembali wasiat *olografisnya* sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban notaris. (Pasal 935 KUH Perdata) sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis,

diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat. (Pasal 936 KUH Perdata), bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu ditemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu dibuat. (Pasal 937 KUH Perdata), surat wasiat *olografis* yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan. (Pasal 938 KUH Perdata), wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi. (Pasal 939 KUH Perdata) not aris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas. (Pasal 940 KUH Perdata) Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya. (Pasal 942 KUH Perdata), setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu dibuat. (Pasal 943 KUH Perdata) notaris yang menyimpan surat-surat wasiat harus memberikannya kepada ahli waris. (Pasal 944 KUH Perdata), saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. (Pasal 945 KUH Perdata), warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik. (Pasal 946 KUH Perdata). Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan. (Pasal 947 KUH Perdata), surat wasiat

orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat dihadapan nakhoda atau mualim kapal itu. (Pasal 948 KUH Perdata) Mereka yang mengidap penyakit menular dapat membuat surat wasiat di hadapan pegawai negeri. (Pasal 949 KUH Perdata), surat-surat wasiat tersebut dalam tiga pasal yang lalu harus ditandatangani oleh pegawai negeri. (Pasal 950 KUH Perdata) Surat-surat wasiat termaksud dalam Pasal-Pasal 946,947,948 alinea pertama. (Pasal 951 KUH Perdata) Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal-Pasal 946, 947,948 alinea pertama, orang-orang yang disebut di dalamnya boleh membuat wasiat dengan surat di bawah tangan. (Pasal 952 KUH Perdata), surat wasiat demikian akan kehilangan kekuatannya bila pewaris meninggal. (Pasal 953 KUH Perdata) formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat wasiat itu harus diindahkan.

- e. Bagian 5 Wasiat Pengangkatan Ahli Waris Mengatur Tentang: (Pasal 954 KUH Perdata), wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia. (Pasal 955 KUH Perdata), pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris yang diangkat dengan wasiat dapat memperoleh besit. (Pasal 956 KUH Perdata), bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, maka Hakim dapat memerintahkan agar harta benda itu disimpan di pengadilan.
- f. Bagian 6 Wasiat Mengatur: (Pasal 957 KUH Perdata), wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu. (Pasal 958 KUH Perdata), wasiat yang murni dan

tidak bersyarat, diberikan kepada penerima wasiat (*legitans*). (Pasal 959 KUH Perdata), penerima wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu. (Pasal 960 KUH Perdata), bunga dan hasil barang-barang yang dihibahwasiatkan diberikan kepada penerima wasiat. (Pasal 961 KUH Perdata), pajak wasiat diberikan kepada penerima Wasiat. (Pasal 962 KUH Perdata), bila pewaris mewajibkan suatu beban kepada beberapa penerima hibah, maka mereka wajib memenuhinya. (Pasal 963 KUH Perdata), barang yang dihibahwasiatkan harus diserahkan semuanya kepada ahli waris. (Pasal 964 KUH Perdata), setelah ahli waris menerima warisan maka hasil dari pemanfaatan harta waris tidak termasuk hibah waris. (Pasal 965 KUH Perdata) sebelum atau sesudah dibuat surat wasiat, barang yang dihibahwasiatkan terikat dengan hipotek atau dengan hak pakai basil untuk suatu utang dan harta peninggalan maka orang yang harus menyerahkan wasiat itu tidak wajib melepaskan barang dan ikatan itu. (Pasal 966 KUH Perdata), bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, wasiat tersebut batal. (Pasal 967 KUH Perdata) ketentuan pasal yang lalu tidak menjadi halangan untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada ahli waris atau penerima wasiat. (Pasal 968 KUH Perdata), hibah-wasiat mengenai barang-barang tertentu adalah sah. (Pasal 969 KUH Perdata), bila wasiatnya terdiri dari barang-barang tak tentu, ahli waris tidak wajib memberikan barang yang terbaik. (Pasal 970 KUH Perdata), bila yang dihibahwasiatkan hanya hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan tanpa digunakan kata-kata hak pakai basil

atau hak pakai oleh pewaris, maka barang yang bersangkutan haruslah tetap berada dalam pengelolaan ahli warisnya. (Pasal 971 KUH Perdata), wasiat kepada seorang kreditur tidak boleh dihitung sebagai pelunasan piutangnya. (Pasal 972 KUH Perdata), bila warisan tidak seluruhnya atau hanya sebagian diterima, maka hibah-wasiat itu harus dikurangi, sebanding dengan besarnya masing-masing, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain mengenai hal itu.

- g. Bagian 7 Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat Untuk Kepentingan Cucu-Cucu dan Keturunan Saudara Laki-Laki dan Perempuan Mengatur: (Pasal 973 KUH Perdata), barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orangtua, boleh mereka wasiatkan. (Pasal 974 KUH Perdata) demikian juga, boleh dibuat penetapan wasiat untuk keuntungan satu atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan dan pewaris. (Pasal 975 KUH Perdata), bila ahli waris meninggal dengan meninggalkan anak-anak, maka sekalian keturunan ini berhak menikmati bagian dari harta waris. (Pasal 976 KUH Perdata), segala penetapan wasiat yang diizinkan oleh Pasal 973 dan 974, hanya berlaku pada pengangkatan waris. (Pasal 977 KUH Perdata), hak-hak ahli yang diangkat dengan penunjukan ahli waris dengan wasiat, mulai berlaku pada saat berhentinya hak menikmati atas barang. (Pasal 978 KUH Perdata), barangsiapa membuat penetapan-penetapan tersebut dalam pasal yang lalu, dengan suatu wasiat atau dengan suatu akta notaris yang dibuat kemudian, boleh menempatkan barang-barang di bawah kekuasaan satu atau beberapa pengelola selama dalam masa beban. (Pasal 979 KUH Perdata), bila pengelola itu

meninggal atau tidak ada, Hakim berkuasa mengangkat orang lain untuk mengganti pengurus itu. (Pasal 980 KUH Perdata), dalam waktu sebulan setelah meninggalnya orang yang membuat penetapan wasiat seperti di maka atas permintaan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan jawatan Kejaksaan, harus dibuat perincian barang-barang yang merupakan harta peninggalan itu. (Pasal 982 KUH Perdata), bila pewaris tidak mengangkat pengelola, maka barang-barangnya dikelola oleh ahli waris yang dibebani, dan ia wajib menjamin penyimpanannya. (Pasal 983 KUH Perdata), ahli waris memikul beban, harus merelakan barang-barang itu dialihkan, atas permohonan orang-orang yang berkepentingan. (Pasal 984 KUH Perdata), ahli waris pemikul beban, yang menjalankan sendiri pengelolaannya, harus mengelola barang-barang itu sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yang baik. (Pasal 985 KUH Perdata), segala harta benda tetap, demikian pula bunga dan piutang, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani, kecuali dengan izin Pengadilan Negeri. (Pasal 986 KUH Perdata), pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang pada bagian ini diperkenankan, tidak boleh dipertahankan terhadap pihak ketiga. (Pasal 987 KUH Perdata), ahli waris karena undang-undang atau ahli waris karena surat wasiat dan orang yang mengangkat ahli waris dengan wasiat, tidak boleh mengajukan bantahan kepada ahli waris. (Pasal 988 KUH Perdata), para pengelola wajib menyelenggarakan pengumuman, pendaftaran dan pembubuhan keterangan.

- h. Bagian 8 Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat dan Apa Yang Oleh Ahli Waris Atau Penerima Wasiat Tidak Dipindahtangankan Atau Dihabiskan

Sebagai Harta Peninggalan Mengatur: (Pasal 989 KUH Perdata), dalam hal ada pengangkatan ahli waris atau pemberian wasiat ahli waris atau penerima hibah berhak memindahkan atau menghabiskan barang-barang warisan. (Pasal 990 KUH Perdata), kewajiban untuk membuat perincian harta peninggalan atau daftar setelah pewaris meninggal, dan kewajiban untuk menyerahkan surat-surat itu kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. (Pasal 991 KUH Perdata, setelah meninggalnya ahli waris atau penerima hibah yang dibebani, ahli waris berhak menuntut, supaya segala sesuatu yang masih tersisa dan warisan atau wasiat itu segera diserahkan.

- i. Bagian 9 Pencabutan Dan Gugurnya Wasiat Mengatur Tentang: (Pasal 992 KUH Perdata), suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu. (Pasal 993 KUH Perdata), surat wasiat yang memuat penetapan-penetapan yang dahulu, seharusnya diulangi agar tidak menimbulkan kerancuan. (Pasal 994 KUH Perdata), surat wasiat yang baru dapat membatalkan penetapan-penetapan surat wasiat yang terdahulu. (Pasal 995 KUH Perdata), pencabutan yang dilakukan dengan surat wasiat yang kemudian baik secara tersurat maupun tersirat berlaku sepenuhnya. (Pasal 996 KUH Perdata), semua pemindahtanganan, harta warisan seluruhnya atau sebagian, akan mengakibatkan tercabutnya wasiat yang dipindahtangankan. (Pasal 997 KUH Perdata), semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan

sifatnya sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya. (Pasal 998 KUH Perdata), bila pewaris bermaksud menanggukkan pelaksanaan penetapannya, maka hal yang demikian itu tidak menghalangi ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu untuk mempunyai hak yang diperoleh itu. (Pasal 999 KUH Perdata), suatu wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah sama sekali semasa pewaris masih hidup. (Pasal 1000 KUH Perdata), suatu wasiat berupa bunga, piutang atau tagihan utang lain kepada pihak ketiga, gugur pada saat pewaris meninggal dunia. (Pasal 1001 KUH Perdata), suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau wasiat itu. (Pasal 1002 KUH Perdata), warisan atau wasiat bagi para ahli waris atau penerima hibah menjadi bertambah, dalam hal pengangkatan ahli waris atau pemberian wasiat ditetapkan untuk beberapa orang. (Pasal 1003 KUH Perdata), selanjutnya pewaris juga harus memberikan wasiat kepada beberapa orang bersama-sama, bila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi. (Pasal 1004 KUH Perdata), pernyataan gugurnya surat-surat wasiat dapat diminta setelah meninggalnya pewaris.

C. Syarat-syarat Wasiat

1. Syarat dan Rukun Wasiat Menurut Hukum Islam

Adapun syarat dan rukun wasiat menurut Hukum islam ada empat macam, sebagai berikut :

- a. Orang yang berwasiat

Orang yang berwasiat itu disyaratkan adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kecakapan yang sah. Dengan begitu orang yang bersangkutan memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Keabsahan kecakapan ini didasarkan pada tanda-tanda baligh, berakal dan merdeka.¹⁶

Dalam hal orang yang berwasiat semua mazhab sepakat bahwa wasiat seorang gila yang dibuat dalam keadaan gila dan wasiat anak kecil yang belum mummayiz adalah tidak sah.¹⁷ Oleh karena itu tidak sah suatu wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, budak sekalipun mukallaf tanpa seizin tuannya dan juga orang yang dipaksa wasiat kecuali :

- 1) Wasiat anak kecil yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk selama dalam batas-batas kemaslahatan.
- 2) Wasiat yang dibatasi terhadap orang yang dungu dalam hal kebaikan, antara lain mengajarkan Al-quran, membangun masjid, membangun rumah, dan lain sebagainya.

Sedangkan si pewasiat itu sendiri harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) dewasa (baligh).
- 2) Berakal sehat (aqil).
- 3) Bebas menyatakan kehendaknya.
- 4) Merupakan tindakan tabarru (derma sukarela tau amal).

¹⁶ Abdurahman Al-Jaziry, Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabi al arba'ah, (Beirut, Dar Al-Fikr, Maktabah At-Tijariyah, 1987), Juz III, hal 317

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta, PT Lentera Basritama, 1996), cet ke 2 hal 505.

5) Tidak dalam keadaan dibawah curatale.

6) Beragama Islam.

Sejalan dengan itu ulama Hanafiyah juag menguisyaratkan pada pemberi wasiat ini selain harus mempunyai kecakapan yang sah juga harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1) Baligh.

2) Berakal. Tidak sah wasiat dari orang gila ketika ia gila walaupun ia sempat sembuh dan kemudian meninggal dalam keadaan sembuh.

3) Tidak boleh bersenda gurau atau main-main serta tidak boleh dipaksa.

4) Tidak boleh mempunyai hutang yang dapat menghabiskan hartanya.

5) Bukan termasuk ahli waris pada waktu ia meninggal dunia dan pada waktu berwasiat.

6) Bukan seorang hamba.

7) Lisannya harus jelas.¹⁸

Semua mazhab sepakat bahwa wasiat tidaklah ditujukan kepada mereka yang dalam keadaan gila atau mengwasiatkan kepada anak kecil yang belum umayiz adalah tidak sah, tetapi ada beberapa mazhab yang berselisih paham tentang mengwasiatkan kepada anak kecil yang belum mumayiz.

Menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i dalam salah satu qaulnya mengatakan bahwa wasiat anak umur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*jaiz*) sebab khalifah umar memperbolehkannya.¹⁹ Menurut

¹⁸ Abdurahman Al-Jaziry, Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabi al arba'ah, (Beirut, Dar Al-Fikr, Maktabah At-Tijariyah, 1987), Juz III, hal 318

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1999), Cet ke-4 hal 50

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya.²⁰

Kemudian menurut Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat anak kecil yang seperti itu diperbolehkan (jaiz) dalam masalah kebaktian, dan perbuatan baik, tetapi tidak boleh dalam masalah lainnya, sebab Imam Ash-Shadiq memperbolehkannya dalam hal itu.²¹

b. Penerima Wasiat

Adapun dalam orang yang menerima wasiat harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1) Harus dapat diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat itu, nama orang yang menerima tersebut, badan organisasi tertentu atau masjid-masjid.
- 2) Ada pada saat wasiat dinyatakan secara yuridis, misalnya anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Bukan tujuan kemaksiatan.
- 4) Bukan ahli waris yang berwasiat.
- 5) Penerima wasiat bukan pembunuh yang memberi wasiat.

Semua mazhab sepakat bahwa tidak bolehnya wasiat untuk ahli waris kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Menurut mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan.²²

Mengenai penerimaan wasiat, para fuqaha sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW :

لاوصية

Artinya : “ *tidak ada wasiat bagi ahli waris* “. (HR. Muslim dan Abu Dawud)²³

Syarat mengenai penerima wasiat, para imam mazhab empat sepakat tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris yang lain. Semua mazhab juga sepakat bahwa seorang dzimmi boleh berwasiat untuk sesama dzimmi, juga untuk seorang muslim, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 :

Artinya : “*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim.*”.

Namun para imam mazhab berselisih tentang sahnya wasiat seorang muslim untuk seorang kafir harbi. Imam maliki, Hambali, dan mayoritas syafi'i

²² *Ibid.* hal. 507

²³ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid analisa Fiqih Para Mujtahid, (jakarta, Pustaka Amani, 2007) jilid III, Hal 366

mengatakan bahwa wasiat seperti itu adalah sah, sedangkan mazhab hanafi mengatakan tidak sah.²⁴

c. Barang yang diwasiatkan

Adapun sesuatu yang diwasiatkan ini bisa dimiliki setelah pewasiat meninggal dunia. Serta harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau dapat menjadi obyek perjanjian.
- 2) Benda itu sudah ada.
- 3) Hak milik itu betul-betul kepunyaan si pewasiat.
- 4) Bermanfaat bagi yang berwasiat ataupun orang yang menerima wasiat.
- 5) Bukan untuk kemaksiatan.
- 6) Bukan barang yang haram baik dari jenisnya maupun dari cara mendapatkannya.²⁵

Dalam menentukan 1/3 (sepertiga) harta, para mazhab diantaranya abu hanifah, ahmad ibnu hanbal dan As-syafi'i mengatakan bahwa 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta milik yang berwasiat dihitung pada saat ia meninggal dunia bukan pada waktu ia berwasiat. Sedangkan imam malik berpendapat 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta yang berwasiat waktu ia menyatakan wasiatnya.

Pada prinsipnya besarnya wasiat yang dibenarkan syariat maksimal 1/3 (sepertiga) harta peninggalan setelah diambil biaya perawatan dan pembayaran hutang si mayit. Meskipun pewasiat memiliki kebebasan, tetapi

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah

²⁵ Abd. Al-Rahman Aljaziri, hal. 329

jumlah wasiat itu telah ditentukan oleh syariat. Jika ternyata ada wasiat pewaris yang lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut :

- 1) Harta warisan dikurangi hingga batas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan.
- 2) Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan harta warisan atas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan itu atautkah tidak. Apabila mereka mengikhlaskannya, maka halal hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan, akan tetapi jika ahli waris tidak mengikhlaskannya atau mengizinkannya maka kelebihan dari wasiat itu harus diberikan kepada ahli waris.

d. Shigat (*lapaz/ucapan wasiat*)

Shigat adalah pernyataan dari pewasiat tentang maksud yang terkandung dalam hati, untuk mengwasiatkan sebagian hartanya. Namun tidak terdapat dalam redaksi khusus untuk wasiat, sehingga wasiat itu sah diterapkan dengan redaksi bagaimanapun yang dapat dianggap menyatakan pemberian hak kepemilikan secara sukarela setelah wafat.

Shigat dalam wasiat hanya berisikan *ijab qabul* yang dapat dilakukan oleh pewasiat dengan tiga cara, yaitu ucapan, isyarat dan tulisan. Mazhab syafi'i dan maliki mengatakan : “ jika si sakit sulit berbicara, maka wasiat sah diberikan dengan isyarat yang dimengerti”.

Sedangkan menurut abu hanifah dan ahmad ibn hanbal, wasiat dalam keadaan seperti itu tidak sah. Namun apabila wasiat itu ditulis dengan tulisan

tangan si sakit dan diketahui bahwa ia memang tulisannya, tetapi penulisannya itu tidak disaksikan, maka menurut pendapat abu hanifah, syafi'i dan maliki tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hukum dan tulisan itu tidak dianggap wasiat. Akan tetapi menurut imam ahmad ibn hanbal wasiat tertulis yang demikian itu tetap dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa si sakit tidak menarik kembali (membatalkan) wasiat tertulisnya itu.²⁶

Wasiat itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab dan qabul yang ditujukan oleh siapa memberi harta tanpa imbalan. Sebagai contoh “ si pewasiat berkata : aku wasiatkan kepadamu, aku berikan kepadamu, dan aku serahkan kepadamu atau yang serupa dengan itu, sedang yang menerima berkata “ Ya “ aku terima pemberianmu. Menurut Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa ucapan Qabullah yang dipegang dalam hibah, akan tetapi menurut Hanafiyah mengatakan bahwa ijab saja sudah cukup. Sedangkan Hanabiyah berpendapat wasiat itu sah dengan menunjukkan bukti kepadanya, karena Nabi Muhammad SAW diberi dan menerima wasiat.

2. Syarat dan Rukun Wasiat Menurut Hukum Perdata

Adapun syarat dan rukun wasiat menurut Hukum Perdata dapat dilihat dalam empat macam yaitu :

a. Syarat-syarat Wasiat

Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat di manfaatkan sesuai kebutuhan. Pemberian harta

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, opcit hal 505

warisan ini dapat dilakukan dengan surat wasiat.²⁷ Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri²⁸ :

- 1) Menurut Pasal 895 KUH Perdata : Pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.
- 2) Menurut Pasal 897 KUH Perdata: Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*.

b. Isi Wasiat

Sementara itu, adapun yang menjadi syarat-syarat isi wasiat sebagai berikut²⁹ :

- 1) Dalam Pasal 888 KUH Perdata: Jika *testament* memuat syarat – syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
- 2) Dalam Pasal 890 KUH Perdata : Jika di dalam *testament* disebut sebab yang palsu, dan isi dari *testament* itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka *testament* tidaklah syah.
- 3) Dalam Pasal 893 KUH Perdata: Suatu *testament* adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

²⁷ Sembiring M U, Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Program Pendidikan Notariat, Fakultas Hukum Usu, Medan, 1989, Hal. 45.

²⁸ http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=124990310864045 diakses tanggal 4 juni

²⁹ <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&search=wasiat+menurut+kuh+perdata&fulltext=Caridiakses> tanggal 14 juni

Selain ahli waris juga dapat menerima seluruhnya maupun sebagian harta, misalnya setengahnya atau sepertiganya. Seperti yang tercantum dalam pasal 754 yang berbunyi ; wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.³⁰

c. Pembatalan Wasiat

Wasiat dapat dikatakan batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalannya, tergantung dari syarat-syarat manakah yang dilanggar. Untuk menemukan konstruksi hukumnya, pasal 1320 BW secara garis besar harus dibaca Syarat syahnya perjanjian sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap disebut sebagai syarat Subjektif yaitu syarat yang berkaitan atau ditujukan pada si subjek hukum atau orangnya; yang apabila tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur tersebut maka suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya.
- c. Suatu hal tertentu dan syaratnya
- d. Suatu sebab yang halal disebut objektif yaitu syarat yang ditujukan pada objek hukum dan bendanya.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat/ unsur-unsur tersebut maka suatu perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian, apabila dikatakan suatu hibah batal demi hukum maka tidak perlu dilakukan permohonan

³⁰ Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2009, 143-144.

pembatalannya kepada hakim (oleh si pemberi hibah) karena secara yuridis hibah wasiat tersebut tidak pernah ada dan konsekuensi-konsekuensi hukumnya pun tidak ada. Akan tetapi, apabila ada pelanggaran syarat No.1 dan No.2 maka dapat dimintakan pembatalannya oleh si pemberi hibah/ orang yang paling berhak. Sebagai catatan: kata dapat dalam terminologi hukum mengandung opsi yang ditujukan kepada si pemberi hibah / orang yang paling berhak untuk melakukan proses pembatalannya melalui hakim di pengadilan. Hibah yang terlanjur terproses dan penerima hibah adalah anak yang belum dewasa maka dikategorikan sebagai tidak cakap secara hukum; dalam hal ini hibah wasiat tersebut seharusnya disebutkan siapa pihak yang ditunjuk sebagai walinya sampai anak berusia dewasa atau telah menikah. Pertanyaan apakah diperlukan penetapan pengadilan bagi orang tua untuk mengembalikan objek hibahnya maka, kembali kepada unsur No.2/Cakap sebagaimana telah diterangkan diatas maka hibah dapat dimintakan pembatalannya melalui hakim dipengadilan.

d. Subjek Pengwasiatan

Orang-orang yang diperbolehkan untuk melakukan wasiat menurut hukum perdata adalah seseorang yang telah mencapai akil baligh dan sehat pemikirannya, baik laki-laki maupun perempuan sebab menurut hukum perdata perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam melakukan suatu wasiat.

Seorang istri boleh melakukan penghibah wasiatan, karena secara yuridis antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi. Tetapi hal ini terbatas dalam soal-soal perkawinan saja, sebab Islam tidak menjadikan suami sebagai penguasa dalam semua bidang kehidupan. Kebolehan seorang istri dalam melakukan hibah wasiat pada dasarnya diberikan secara bebas, tetapi terbatas atas harta yang dimilikinya saja. Adapun harta yang ada pada pemilikan harta bersama suami, maka seorang istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Izin seorang istri kepada suami yang akan melakukan hibah wasiat akan pemeliharaan harta bersama sangatlah penting.

Menurut hukum Islam hibah wasiat pada hakekatnya pada diberikan kepada siapapun juga. Jika penghibahan itu diberikan kepada anak di bawah umur atau orang yang tidak sehat pemikirannya, maka benda yang dihibah wasiatkan tersebut harus diserahkan kepada seorang wali yang sah dari penerima hibah wasiat tersebut. Pemberian hibah wasiat dapat diberikan dengan sah kepada seorang yang akan menjadi ahli waris, tetapi tidaklah dipandang baik walaupun bukan tidak sah, mengutamakan yang tertentu dari yang lain. Memberikan hibah wasiat kepada seseorang yang belum lahir adalah batal, tetapi pemilikan yang terbatas dapat dituntut kepada seseorang yang sedang dihamilkan, sedang diwaktu pemberian itu dilakukan yang bersangkutan telah lahir pada waktu pemilikan itu mulai berlaku.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan / hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi.
- 2) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersamasama saudara pewaris,
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atasmaupun ke samping.

Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak sipembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan

seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.

Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato*, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris. Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahliwaris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat.

Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi pasal 881 ayat (2), yaitu: “*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak*”. Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “*legitime portie*”³⁶ ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapatdihapuskan oleh si pewaris.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, *R. Subekti*, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau *testamen* menurut sekehendak hatinya sendiri”. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 BW).
- 2) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 BW, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan

“menerima warisan secara *beneficiair* yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu :

- 1) Menerima warisan dengan penuh.
- 2) Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah ”menerima warisan secara *beneficiaire*.
- 3) Menolak warisan. Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk menemukan model alternatif sistem dan pengembangan yang ditelusuri dalam penelitian ini, maka penulis akan memenuhi unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir masalah, tujuan, dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal yang menjadi titik tolak dalam penelitian.

2. Metode Pendekatan

Ada empat jenis pendekatan yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini, yaitu :

- a) Pendekatan Syar'i, yaitu penulis dalam penulisannya berpedoman pada dalil-dalil nash Al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.

- b) Pendekatan Yuridis, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemberlakuan suatu hukum karena adanya pengakuan undang-undang atau konstitusi negara atau daerah kekuasaan. Pengkajian skripsi ini mengacu pada konsistensinya dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- c) Pendekatan Historis, pendekatan ini dimaksudkan untuk menggarap masa lalu yang bahannya atau tempat catatannya adalah dokumen dalam arti luas, termasuk kebiasaan-kebiasaan dalam prosedur atau cara mengumpulkan, memilih, dan menafsirkan catatan masa lalu.
- d) Pendekatan Sosiologis, pendekatan sosiologis digunakan dengan pertimbangan bahwa suatu hukum dikatakan berlaku apabila nilai-nilai yang terdapat di dalamnya sejalan dengan keberlakuannya dalam masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data, penulis menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan metode proporsif yaitu penulis yang menentukan sendiri sumber data (informan) yang diinginkan, informan yang paham dengan permasalahan yang ada di lapangan.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder.¹

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Untuk memperoleh data tersebut, akan dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan kajian atau pendapat pakar dalam berbagai literatur yang ada baik berupa buku, makalah, surat kabar, internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

b. Penelitian Empiris untuk memperoleh data primer.²

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui wasiat sesuai dengan informan yang telah ditentukan. Untuk itu akan dilakukan wawancara atau pengamatan langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sehingga penulis akan memaparkan lokasi penelitian, populasi, dan sampel sebagai berikut :

¹ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan pertama, 2005, hal 28-31

² Sri Mamudji, dkk, *ibid* hal 49-50

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Kantor MUI dan Muhammadiyah. Dipilihnya lokasi penelitian pada instansi-instansi tersebut oleh karena didasarkan atas pertimbangan, bahwa lokasi tersebut sangat representatif untuk dijadikan objek penelitian. Kedua instansi inilah yang menjadi tonggak dalam perkembangan Islam dalam berbagai aspek di kota Makassar.

2. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat Kota Makassar
- b. MUI Kota Makassar dan
- c. Muhammadiyah Kota Makassar

3. Sampel

Bertolak dari populasi tersebut di atas, maka peneliti akan menarik sampel, sebagai berikut :

- a. Populasi masyarakat kota Masyarakat bersifat homogen sehingga semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian.

- b. Populasi pengurus MUI dan Muhammadiyah, pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara tidak mengacak (*non Random Sampling*) atau *sample non probabilitas*.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode proporsif yaitu penulis yang menentukan sendiri sumber data (informan) yang diinginkan, informan yang paham dengan permasalahan yang ada di lapangan yang perinciannya sebagai berikut :

- 1) Masyarakat Kota Makassar sebanyak 4 (empat) orang informan yang memiliki pengetahuan tentang wasiat.
- 2) Pengurus MUI sebanyak 2 (dua) orang informan yang memiliki pemahaman yang luas mengenai wasiat dan perkembangannya di Kota Makassar.
- 3) Pengurus Muhammadiyah sebanyak 2 (dua) orang informan yang memiliki pemahaman yang luas mengenai wasiat dan perkembangannya di Kota Makassar.

B. Metode Pengolahan dan Analisis data

Adapun metode pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh baik melalui penelitian normatif maupun penelitian empiris selanjutnya dilakukan editing untuk memeriksa apakah data tersebut layak atau valid untuk dilanjutkan kemudian serta untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, untuk selanjutnya di analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode penulisan yang menggunakan data atau fakta yang ada dengan menggambarkan setiap aspek sebagaimana adanya. Analisis kualitatif digunakan pada pendekatan empiris berdasarkan jawaban-jawaban responden berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian terhadap permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman wasiat bagi masyarakat kota Makassar
- b) Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman wasiat pada organisasi MUI di kota Makassar
- c) Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman wasiat pada organisasi Muhammadiyah di kota Makassar

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahaman serta pelaksanaan wasiat di Kota Makassar.
- b) Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan dan bacaan.
- c) Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain sehubungan dengan obyek penelitian ini.

BAB IV

PEMAHAMAN WASIAT DALAM PRESPEKTIF MUI DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA MAKASSAR

A. Pelaksanaan Wasiat Pada Masyarakat Kota Makassar

Masyarakat kota Makassar memiliki tatacara sendiri dalam pembagian harta peninggalan orang tua yang sesuai dengan budaya mereka yang sudah hidup bertahun-tahun. Budaya tersebut mengakar kuat dalam kesadaran individual dan kolektif mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk di dalamnya persoalan pengalihan harta antargenerasi. Pada praktiknya, pengalihan harta tersebut, masyarakat melakukannya dengan berbagai cara, seperti melalui institusi hibah, wasiat, maupun waris. wasiat dipraktikkan masyarakat dalam melakukan pembagian harta kekayaan, memiliki berbagai tujuan:

- a. Menghindari kekhawatiran terjadinya percekocokan keluarga apabila pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan farâidl,
- b. Untuk mengedepankan keadilan dalam pembagian harta, minimal keadilan menurut persepsi orang yang membagi.

Praktik pembagian harta dengan menggunakan institusi wasiat jamak terjadi di masyarakat. Ketika penulis mempertanyakan kepada dosen Fiqh Mawaris yang mengambil matakuliah tersebut ditambah lagi

dengan beberapa responden warga masyarakat kota Makassar, kurang lebih 80% mengatakan bahwa praktik pembagian harta tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan farâidl, melainkan menggunakan wasiat, khususnya wasiat pembagian harta warisan. Pada praktiknya, pemberian wasiat juga bermacam-macam. Ada yang membagi berdasarkan tingkat perekonomian “ahli waris”, ada yang membagi dengan melebihkan bagian untuk anak laki-laki daripada anak perempuan, namun tidak persis dua berbanding satu, dan ada juga yang menghibahkan hampir semua hartanya secara sama antara laki-laki dan perempuan dan menyisakan sedikit harta warisan yang akan dibagi secara farâidl, ada yang memberikan wasiat lebih banyak kepada anak perempuan dengan harapan ketika pembagian warisan secara farâidl nanti bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama atau tidak berbeda jauh.

Dari penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa ketaatan masyarakat Makassar dalam melaksanakan hukum waris Islam adalah lemah, mereka lebih memilih penyelesaian dengan menggunakan wasiat, sementara itu pelaksanaan pembagian harta melalui institusi waris lebih rendah daripada institusi hibah dan wasiat. Kondisi rendahnya kesadaran hukum terhadap pelaksanaan pembagian warisan secara Islam (farâidl) ini timbul karena dua kemungkinan, yaitu: a) rendahnya

sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam dan b) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam.

Rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam menerapkan ketentuan yang terdapat dalam farâidl ini, menurut Hazairin disebabkan oleh perbedaan kultur dan sistem kekeluargaan antara tempat diformulasikannya ketentuan waris Islam dengan Indonesia. Hukum waris Islam didasarkan kepada kebudayaan Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan Patrilineal.¹ Sementara sistem kekeluargaan yang dikehendaki dalam al-Qur'an adalah sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Tidak ada sinkronisasi antara sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan yang diformulasikan dalam sistem kewarisan Islam (farâidl) yang mengadopsi sistem kewarisan mazhab Sunni. Oleh karena itu, terjadi banyak konflik dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia khususnya wasiat, bahkan dalam keluarga yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal sekalipun.

Konflik-konflik inilah yang barangkali memicu kepada rendahnya ketaatan masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam karena apabila hukum waris Islam (farâidl) tersebut diterapkan secara tekstual, maka akan menodai rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

¹ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith (Jakarta: Tintamas, 1976) h. 75

Oleh karena itu, banyak masyarakat beralih kepada institusi wasiat dalam melakukan pembagian harta “warisan” sebagai jalan keluar dalam pembagian harta yang memenuhi rasa keadilan keluarga dan masyarakat tersebut.

Pertanyaan kemudian, apakah pembagian harta “warisan” dengan menggunakan institusi wasiat itu bertentangan atau setidaknya tidaknya memiliki anggapan bahwa tidak mengakui prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum waris Islam (*farâidl*)?. Menurut salah satu tokoh masyarakat kota makassar yang ternama mengatakan bahwa ayat yang berbicara mengenai wasiat sebanyak sepuluh kali, sementara ayat yang berbicara mengenai warisan tiga kali. Bahkan dalam ayat waris diawali dengan kata wasiat (يُوصِيكُم) dan diakhiri dengan kalimat wasiat juga (وَصِيَّةٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ).² Kondisi ini menunjukkan bahwa wasiat memiliki nilai yang cukup signifikansi dalam pembagian harta “warisan”. Namun realitasnya, masyarakat Muslim sekarang ini:

1. Memberikan prioritas secara mutlak kepada waris dan ketentuan-ketentuannya, bukan wasiat dan ketentuan-ketentuannya.

² Syahrûr, Muhammad, *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî*: (Damaskus: al-Ahâlî, 2000)h. 123

2. Menekankan kepada penghapusan ayat wasiat khususnya terhadap firman Allah: “*al-washiyyatu li al-wâlidain wa al-aqrabîn*” dengan hadis ahad dan munqathi‘ yang diriwayatkan oleh ahl al-maghâzî “*lâ washiyyata li wârits*”.
3. Mencampur aduk pemahaman terhadap kata *al-hadl* dan *al-nashîb* yang berimplikasi kepada pencampuran antara ayat waris dan ayat wasiat. Firman Allah: (والأقربين نصيب)
dianggap sebagai ayat waris, padahal ayat tersebut adalah ayat wasiat, karena *nashîb* adalah bagian manusia dalam wasiat, sementara *hadl* adalah apa yang diterimanya dalam waris.
4. Tidak membedakan antara keadilan umum yang terdapat dalam ayat waris dan keadilan khusus dalam ayat wasiat, di mana yang umum tidak boleh menutupi yang khusus.³

Ketentuan wasiat inilah yang lebih bisa merealisasikan keadilan dalam pembagian “warisan” di masyarakat atau keluarga tertentu, mengingat setiap keluarga atau masyarakat kota Makassar memiliki relasi dan tanggung jawab dalam keluarga yang berbeda antara keluarga atau masyarakat satu dengan yang lain.

³ Syahrûr, Muhammad, *Fiqh al-Mar’ah (al-Washiyyah, al-Irts, al-Qiwâmah, al-Ta’adudiyyah, al-Libâs)* (Damaskus: al-Ahâfî, 2000) h. 52

Oleh karena itu, perilaku masyarakat atau keluarga untuk melakukan pembagian “warisan” dengan menggunakan institusi wasiat merupakan motif alamiah dalam rangka menegakkan keadilan dalam pembagian harta “warisan” yang disesuaikan dengan relasi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga dan masyarakat yang tentunya memiliki perbedaan antara keluarga atau masyarakat satu dengan yang lainnya.

B. Pemahaman Wasiat Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia Di Kota Makassar

Wasiat merupakan institusi pengalihan harta yang biasa dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelum Islam. Menurut hukum Romawi, seorang pemilik harta memiliki kebebasan untuk mewasiatkan hartanya tanpa ada batasnya, bahkan dengan tidak memberikan sama sekali kepada anak-anaknya. Demikian juga kondisi bangsa Arab sebelum Islam, mereka akan bangga dan berlomba-lomba memberikan wasiat kepada orang lain dan mengabaikan wasiat kepada para kerabatnya. Kondisi ini sangat merugikan anak-anak mereka dan kerabatnya yang lebih berhak untuk menerima harta milik orang tua atau kerabatnya.

Ketika Islam datang, tradisi pengalihan harta melalui institusi wasiat ini diluruskan dengan lebih mengutamakan pemberian wasiat

kepada kedua orang tua dan para kerabatnya, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁴

Dengan adanya firman Allah ini, maka seorang pemilik harta dibatasi untuk lebih mengutamakan pemberian wasiat kepada orang tua dan kerabatnya. Dia boleh memberikan wasiat kepada orang lain apabila, orang tua dan kerabatnya telah lebih dahulu diberi wasiat.

Tentang cara berwasiat tersebut diatur mengenai cara berwasiat dan pencabutan wasiat yang hanya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau notaries⁵. Ketentuan ini menurut penulis telah mengakomodir mereka yang tidak bisa bicara dan tidak bisa menulis sekaligus. Oleh karena itu, telah diatur mengenai cara berwasiat bagi mereka yang memiliki kelemahan tersebut.

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2004, h. 18.

⁵ Wawancara khusus Penulis tanggal 27 Nopember 2011

Tentang wasiat kepada ahli waris berlaku apabila, a) pewaris sebagai pemilik harta memiliki kekuasaan penuh terhadap harta yang dimilikinya, b) meminta persetujuan kepada semua ahli waris merupakan sesuatu yang tidak mudah, khususnya dalam keluarga yang tingkat ketaatan terhadap orang tua rendah, dan c) keadilan dalam pembagian wasiat tidak ditentukan dengan persamaan kuantitas, tetapi lebih ditentukan dengan jasa, relasi, dan tanggung jawab yang dipikul seseorang. Mereka yang memiliki jasa, relasi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, layak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang lain dan hal ini hanya bisa dilakukan melalui hibah atau wasiat dengan nilai maksimal wasiat tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta yang diwasiatkan. Oleh karena itu, untuk memilah-milah mengenai harta yang diwasiatkan, apabila harta tersebut merupakan harta pusaka, maka ketentuan pembagiannya berdasarkan hukum waris Islam, namun apabila harta tersebut merupakan hasil usahanya, maka pemilik harta tersebut memiliki kebebasan penuh dalam men-tasharrufkan hartanya, meskipun tanpa persetujuan ahli waris.

Tentang wasiat pembagian harta kepada ahli waris. untuk memberikan kebolehan terhadap wasiat seperti ini dengan syarat sebagian besar ahli waris setuju dengan wasiat orang tuanya, khususnya wasiat terhadap harta yang merupakan hasil usahanya.

C. Pemahaman Wasiat Dalam Pandangan Kaum Muhammadiyah di Kota Makassar

Menurut kaum Muhammadiyah kota Makassar, bahwa wasiat itu adalah memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggal dengan cara sedekah atau menderma, dengan pengertian bahwa akad itu tidak bisa dilangsungkan kecuali setelah kematian. Jadi kalau belum ada kematian wasiat belum bisa dikatakan, dan juga orang yang diwasiati berfungsi sebagai pengganti dari orang yang berwasiat dalam menjalankan sesuatu yang diwasiatkan.

Hukum berwasiat bagi orang yang berwasiat adalah bermacam-macam sesuai dengan beragamnya kondisi. kadang wasiat itu wajib, sunnah, mubah bahkan haram sekalipun.

1. Wasiat yang hukumnya wajib adalah wasiat yang menetapkan tugas menyampaikan hak-hak kepada para pemiliknya.
2. Wasiat yang hukumnya sunnah adalah wasiat dengan hak-hak Allah.
3. Wasiat yang hukunya mubah adalah berwasiat kepada orang-orang kaya dari lingkungan keluarga, kerabat atau dari selain mereka.
4. Wasiat yang haram adalah berwasiat dengan harta yang bukan miliknya.

Ketentuan lain ada yang berkenan dengan kata-kata (lafadz), ada yang berkenan dengan hitungan tentang orang yang mewasiatkan

sepertiga hartanya kepada seseorang dengan menentukan (merinci) apa barang yang diwasiatkan itu pada hartanya.

Tentang benda yang dijadikan wasiat dimauqufkan, yakni tidak terus dihukum menjadi milik orang yang diwasiatkan untuknya. karena apabila diterimakan sesudah meninggal yang mewasiatkan, nyatalah dimilikinya.

Disisi lain, pandangan kaum ulama Muhammadiyah tentang wasiat terhadap ahli waris beda agama, yaitu menyerahkan sebagian hak kebendaan yang berlakunya setelah orang yang mewasiatkan meninggal dunia. Apabila cara ini yang ditempuh, maka ahli waris (anak) yang tidak beragama Islam tersebut baru bisa menerima haknya setelah ibu meninggal dunia. Seperti halnya dengan hibah, seorang yang beragama Islam diperbolehkan berwasiat kepada yang tidak beragama Islam, yang tidak diperbolehkan adalah berwasiat kepada ahli waris, berdasarkan hadis riwayat ad-Daruqutni:

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ [رواه الدارقطني]

Artinya: “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

Oleh karena anak yang tidak beragama Islam bukan ahli waris atau tidak berhak menerima warisan, maka tidak termasuk dalam larangan hadis di atas. Mengenai besarnya wasiat yang diperbolehkan

adalah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Amir ibn Sa'ad dari bapaknya, ia berkata:

عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ

وَجَعِ أَشْفَقْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّ

لَوْجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي

قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ

تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ [رواه

[

Artinya: “Rasulullah datang mengunjungi saya pada tahun haji wadda’ sewaktu saya menderita sakit keras, saya berkata kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras sebagaimana engkau lihat, saya mempunyai (banyak) harta sementara tidak ada yang akan mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan saya, apakah sebaiknya saya berwasiat sebanyak duapertiga dari harta saya? Rasul menjawab: Tidak (jangan). Saya bertanya lagi, apa boleh saya berwasiat separuh dari harta saya? Rasul menjawab: Jangan, sepertiga (saja), karena sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak ...” [al-Jami’u as-Sahih, Juz V, halaman 71]

Wasiat yang lebih dari sepertiga, kelebihanannya baru berlaku apabila mendapat ijin dari semua ahli waris. Bagian $\frac{1}{3}$ ini dihitung setelah harta peninggalan itu diambil lebih dahulu untuk biaya penyelenggaraan jenazah, antara lain pembelian kain kafan, biaya penguburan (kalau mau diambilkan dari harta peninggalan) dan setelah dikurangi untuk membayar hutang pewariis (kalau ada). Oleh karena itu hendaknya ibu mempertimbangkan besarnya harta peninggalan antara yang akan diwasiatkan dengan yang dibagi waris, supaya yang menerima wasiat bagiannya tidak lebih banyak dari yang menerima warisan umpamanya. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi kecemburuan di antara ahli waris.

Selanjutnya mengenai harta yang diwasiatkan, menurut hukum Islam seseorang hanya bisa berwasiat terhadap harta kepunyaannya sendiri, tidak bisa berwasiat dari harta orang lain. Dalam urf Indonesia yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, harta keluarga itu bisa terdiri dari beberapa bagian. Ada yang berupa harta bawaan, ada juga harta bersama atau harta gono gini. Harta bersama merupakan kepunyaan suami isteri. Oleh karena itu kalau suami isteri itu bercerai atau meninggal dunia, maka harta bersama dibagi dua bagian dahulu, sebagian merupakan haknya suami dan sebagian lagi merupakan miliknya isteri.

Dengan demikian sepertiga wasiat suami adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta gono gini yang merupakan bagiannya suami ditambah harta bawaan suami (kalau ada) karena setengah dari harta bersama itulah yang merupakan harta miliknya suami yang nanti setelah dikeluarkan untuk membayar wasiat akan dibagi di antara ahli waris, termasuk isteri masih berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian sebagai ahli waris dari harta gono gini-nya suami, karena pewaris tidak mempunyai anak/keturunan.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al- Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 12: *Artinya: "... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu".* [QS. An-Nisa' (4) ayat 12]

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu;

1. Ketaatan masyarakat Makassar dalam melaksanakan hukum waris Islam adalah lemah, mereka lebih memilih penyelesaian dengan menggunakan wasiat, sementara itu pelaksanaan pembagian harta melalui intitusi waris lebih rendah daripada institusi hibah dan wasiat. Ketentuan wasiat inilah yang lebih bisa merealisasikan keadilan dalam pembagian “warisan” di masyarakat atau keluarga tertentu, mengingat setiap keluarga atau masyarakat kota Makassar memiliki relasi dan tanggung jawab dalam keluarga yang berbeda antara keluarga atau masyarakat satu dengan yang lain.
2. Tentang wasiat kepada ahli waris berlaku apabila, a) pewaris sebagai pemilik harta memiliki kekuasaan penuh terhadap harta yang dimilikinya dengan meminta persetujuan kepada semua ahli waris merupakan sesuatu yang tidak mudah, khususnya dalam keluarga yang tingkat ketaatan terhadap orang tua rendah serta

keadilan dalam pembagian wasiat tidak ditentukan dengan persamaan kuantitas, tetapi lebih ditentukan dengan jasa, relasi, dan tanggung jawab yang dipikul seseorang. Mereka yang memiliki jasa, relasi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, layak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang lain dan hal ini hanya bisa dilakukan melalui hibah atau wasiat dengan nilai maksimal wasiat tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta yang diwasiatkan.

3. Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga, kelebihannya baru berlaku apabila mendapat ijin dari semua ahli waris. Bagian $\frac{1}{3}$ ini dihitung setelah harta peninggalan itu diambil lebih dahulu untuk biaya penyelenggaraan jenazah, antara lain pembelian kain kafan, biaya penguburan (kalau mau diambilkan dari harta peninggalan) dan setelah dikurangi untuk membayar hutang pewaris (kalau ada). Oleh karena itu hendaknya ibu mempertimbangkan besarnya harta peninggalan antara yang akan diwasiatkan dengan yang dibagi waris, supaya yang menerima wasiat bagiannya tidak lebih banyak dari yang menerima warisan umpamanya. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi kecemburuan di antara ahli waris.

B. Saran

Bagi para peneliti, tentunya bagi mereka yang berminat mengkaji pelaksanaan wasiat pada kota masyarakat perspektif MUI dan Muhammadiyah untuk mampu mendalami berbagai macam aspek, termasuk aspek sosial yang merupakan satu kesatuan terwujudnya sebuah aturan dalam pelaksanaan hukum secara lebih mendalam. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pembaca dan peneliti yang sejenis di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Amran YS Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Cet. V; Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdana Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008).
- Asyhari Abta, Dujunaidi Syukur, *Ilmu Waris Dsekripsi Islam Praktis dan Terapan*, (Surabaya : Pustaka Hukum Pedana, 2005)
- Abdurahman Al-Jaziry, Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabi al arba'ah, (Beirut, Dar Al-Fikr, Maktabah At-Tijariyah, 1987)
- Abdurahman Al-Jaziry, Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabi al arba'ah, Terjemahan(Beirut, Dar Al-Fikr, Maktabah At-Tijariyah, 1987)
- Buku III KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Cet. Ke-1
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2004
- Ensiklopedia Hukum Islan Jilid 6*, Editor Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta : Ihtiar Islam Baru Van Hoeve, 1996). Lihat juga di Kitab Al-Fiqih 'ala Mazhab Al-Arba'a karya Abdurrahman Al-Jaziry Juz II.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Pres, th. 1979)
- H. Abdurahman, *Kompilasi hukum Islam Di Indonesia*, (jakarta : CV Akademika Pressindo, 1992)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1976)
- http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=124990310864045 diakses tanggal 25 Nopember 2011

[Http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&search=wasiat+menurut+kuh+perdata&fulltext=Caridiakses](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa%3APencarian&search=wasiat+menurut+kuh+perdata&fulltext=Caridiakses) tanggal 25 Nopember 2011

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid analisa Fiqih Para Mujtahid*, (jakarta, Pustaka Amani, 2007)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004

Lihat Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Burgerlijk Wetboek). (cet. 1, Jakarta :Sinar Grafika, 1993)

Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta; Sinar Grafika, 2000)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, PT Lentera Basritama, 1996)

-----, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1999)

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 hal. 82.

Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Suharsimi Arikunto. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. (Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara,2009)

Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan pertama, 2005

Syaikh at-Allamah Muhammad Bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Cet 2 ; Bandung Hasyimi, 2004).

Sembiring M U, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat, Fakultas Hukum Usu, Medan, 1989

Syahrûr, Muhammad, *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî*: (Damaskus: al-Ahâlî, 2000)

Syahrûr, Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah (al-Washiyyah, al-Irts, al-Qiwâmah, al-Ta'adudiyyah, al-Libâs)* (Damaskus: al-Ahâlî, 2000)

Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: PT Eresco, 1993)

Wawancara khusus Penulis tanggal 27 Nopember 2011



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, atau plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 15 Desember 2011

Penulis,

SYARIFAH FATHIYAH

NIM. SO.10.100.107.039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Pemahaman Wasiat Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Muhammadiyah di Kota Makassar (Suatu Analisis Deskriptif Kualitatif)*” yang disusun oleh saudara **Syarifah Fathiyah** Nim; **SO.10.100.107.039**, mahasiswa jurusan **Peradilan Agama** pada fakultas **Syariah dan Hukum** Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis tanggal 15 Desember 2011** bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1432** , dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI), tanpa *(dengan beberapa) perbaikan.

Dewan penguji;

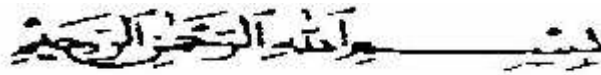
Ketua	:	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Muhammad Sabri AR., M. Ag	(.....)
Penguji	:	H. Abd. Halim Talili, S. Ag., M. Ag	(.....)
Penguji II	:	Andi Intan Cahyani, M. Ag	(.....)
Pembimbing	:	Dra. Hj. A. Nurmaya Aroeng, M. Pd	(.....)
Pembimbing	:	Dr. HM. Jamal Jamil, M. Ag	(.....)

Makassar, 12 Muharram 1432 H
15 Desember 2011

Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين ,
اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat dan salam teruntuk kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw. Atas Ridha dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimalnya setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu yang merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat pada bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi.

Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Penghormatan dan terima kasih yang tiada ternilai kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Herlina dan Ayahanda Sayyid Alwi Al Mahdaly yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan iringan doanya yang telah mendidik dan membesarkan penulis. Namun satu yang tak terlupakan olehmu adalah nasehat serta ajaran yang membuatku mampu menyelesaikan studiku seperti sekarang ini.

2. Kepada Saudara-saudaraku, Bella, Hadi, Sarah dan Ali tercinta yang telah memberikan dukungan. Semoga Allah meridhoi kalian.
3. Bapak Abd. Halim Talli, S. Ag., M. Ag selaku ketua Jurusan Peradilan yang telah memudahkan segala urusanku selama perkuliahan. Semoga Yang Maha Kuasa membalasnya dengan perbuatan yang setimpal.
4. Ibu Dra. Hj. A. Nurmaya Aroeng, M. Pd (Pembimbing I) dan Bapak Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M. Ag.(Pembimbing II) atas bimbingan, dorongan dan petunjuknya selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademik UIN Alauddin Makassar terkhusus pada Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan dalam penyelesaian studi di bangku kuliah.
6. Seluruh staf dan jajaran MUI Kota Makassar dan Muhammadiyah Cab. Makassar dan seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian studi ini.
7. Yang tak mungkin terlupakan, sodara-sodaraku, icha, Amel, Pitto, Dana. Atas bantuannya telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam proses penelitian karya ilmiah ini. Semoga jasa kalian senantiasa mendapat rahmat dari Allah Swt.
8. Teman-teman se-Jurusan Peradilan dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil selama dibangku perkuliahan.
9. Buat yang ter-istimewakan, aku butuh kata yang lebih dari sekedar terima kasih atas segala persembahanmu. Semoga harapan dan cita-citamu tercapai. Amiiin..

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Amiin..

Wassalam

Makassar, Desember 2011

Penulis,

SYARIFAH FATHIYAH

NIM. SO.10.100.107.039



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Hukum Wasiat	13
B. Dasar Hukum Wasiat	18
C. Syarat-Syarat Wasiat	35
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Metode Penelitian	51
B. Metode Pengumpulan Data	52
C. Metode Pengolahan dan Analisis Data	55
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Pelaksanaan Wasiat pada Masyarakat Kota Makassar	58
B. Pemahaman wasiat dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia di kota Makassar	63

C. Pemahaman wasiat dalam pandangan Muhammadiyah di kota Makassar.....	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	75



ABSTRAK

Nama : SYARIFAH FATHIYAH
NIM : SO. 100. 107. 039
Jurusan : Peradilan
Fakultas : Syariah dan Hukum

Skripsi ini berjudul “*Pemahaman Wasiat Dalam Prespektif MUI dan Muhammadiyah di Kota Makassar (Suatu Analisis Deskriptif-Kualitatif).*” Penelitian ini mencoba mengungkap suatu pokok masalah, yakni (1) Bagaimanakah pelaksanaan wasiat pada masyarakat kota Makassar, (2) Bagaimanakah pemahaman MUI kota Makassar tentang wasiat dan (3) Bagaimanakah pemahaman Muhammadiyah kota Makassar tentang wasiat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Tinjauan kepustakaan diarahkan pada buku-buku rujukan yang membahas secara massif tentang permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di kota makassar dengan mewawancarai tokoh-tokoh MUI dan Muhammadiyah untuk mengungkap pemahaman wasiat yang sedang diteliti .

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwasanya sistem yang berlaku di kalangan masyarakat dalam melaksanakan proses wasiat adalah hukum adat yang mereka anut tanpa mempersoalkan perincian dari wasiat itu yang jelasnya hal-hal yang diwasiatkan mengandung asas keadilan, kemanfaatan serat kebersamaan. Pemilihan terhadap sistem hukum ini disebabkan oleh faktor-faktor pemahaman terhadap unsur kepatuhan sebagai usaha untuk melestarikan budaya nenek moyang mereka anut tanpa ada yang merasa dirugikan.

Pada organisasi MUI dan Muhammadiyah tidak mempersoalkan masalah pembagian harta yang diwasiatkan, asalkan harta yang diwasiatkan itu tidak lebih dari 1/3 dari harta secara keseluruhan. Karena masing-masing meniti beratkan pada konsep dasar rasa keadilan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Syarifah Fathiyah**, NIM. **SO.10.100.107.039**, mahasiswa Jurusan **Peradilan Agama** pada Fakultas **Syariah dan Hukum** UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul: *"Pemahaman Wasiat Dalam Prespektif MUI dan Muhammadiyah di Kota Makassar (Suatu Analisis Deskriptif-Kualitatif)"*, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Makassar, Desember 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. A. Nurmaya Aroeng, M. Pd
NIP. 19481219 197703 2 001

Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M. Ag.
NIP. 19691004 200003 1 002



**PEMAHAMAN WASIAT
DALAM PRESPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA MAKASSAR**

(Suatu Analisis Deskriptif-Kualitatif)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah
UTN Alauddin Makassar**

Oleh :

SYARIFAH FATHIYAH
NIM. SO.100.107.039

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2011**